

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS YANG MENERIMA
UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM DI KOTA PEKANBARU**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan Di Fakultas Hukum Universitas Andsalas*



Disusun Oleh:

ANGGI PUTRI CAROLINZA

2220122013

Dosen Pembimbing:

DR. M. HASBI, S.H., M.H

DR. MISNAR SYAM, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS YANG MENERIMA UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM DI KOTA PEKANBARU

Anggi Putri Carolinza, 2220122013, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2024

ABSTRAK

Upah adalah bagian penting dari ketenagakerjaan hubungan kerja dan memiliki peran strategis dalam menjalankan hubungan industrial dengan terjalannya hubungan kerja antara Notaris dan karyawan notaris di satu sisi notaris sebagai pemberi kerja upah sebagai biaya dan karyawan notaris upah sebagai imbalan atas jasa yang dilakukannya. Perlindungan hukum terhadap pekerja atas hasil kerja yang dilakukan maka ditetapkan oleh pemerintah upah minimum sebagai acuan upah sehingga terciptanya keseimbangan antara hak-hak karyawan Notaris dengan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pengaturan hukum ketentuan upah minimum di kota Pekanbaru? 2) Bagaimana bentuk hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris di kota Pekanbaru? 3) Bagaimana upaya perlindungan hak karyawan Notaris dengan menerapkan standar upah minimum di kota Pekanbaru ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris sosiologis. Penelitian ini dilakukan di beberapa kantor Notaris di kota Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah membuat kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja. Salah satunya adalah upah minimum Provinsi/kota Pekanbaru dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Bentuk hubungan hukum hak dan kewajiban karyawan notaris dalam hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan notaris di kota Pekanbaru masih ada hanya berbentuk perjanjian kerja secara lisan dan tidak di dahului dengan perjanjian kerja tertulis. 3) Upaya perlindungan upah ada dalam UU Ketenagakerjaan yang secara terus terang menetapkan sesuai upah minimum untuk kesejahteraan pekerja, namun notaris belum bulat menetapkan upah sesuai dengan upah minimum di kota Pekanbaru masih ada yang menetapkan dibawah upah minimum. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) pengaturan upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah sebaiknya lebih diperhatikan lagi oleh pemberi kerja atau notaris sebaiknya tetap harus menaati sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau yang berlaku dengan memberikan upah yang layak. 2) Hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris lebih dipertegas lagi aturan hak-hak nya yang lebih akurat melalui perjanjian kerja tertulis dengan menjamin kepastian hukum didalamnya. 3) upaya dengan setidaknya itikad baik untuk memikirkan lagi terkait upah dengan kesejahteraan karyawan notaris sehingga terjalinya hubungan kerja yang sangat baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karyawan Notaris, Upah minimum

LEGAL PROTECTION FOR NOTARY EMPLOYEES WHO RECEIVE WAGES BELOW THE MINIMUM WAGE IN PEKANBARU CITY

Anggi Putri Carolinza, 2220122013, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2024

ABSTRACT

Wages are an important part of labor relations and have a strategic role in carrying out industrial relations by establishing work relations between notaries and notary employees, on the one hand, notaries as employers, wages as a fee and notary employees wages as compensation for the services they perform. Legal protection for workers for the work they do is determined by the government as a minimum wage as a wage reference so that a balance is created between the rights of Notary employees and the obligations they have carried out. The formulation of the problem in this research is: 1) What is the form of legal regulation of minimum wage provisions in the city of Pekanbaru? 2) What is the form of legal relationship between notaries and notary employees in the city of Pekanbaru? 3) How are efforts to protect the rights of Notary employees by implementing minimum wage standards in the city of Pekanbaru? This research is legal research with sociological empirical methods. This research was conducted in several Notary offices in the city of Pekanbaru. The data used are primary data and secondary data and data collection techniques use interviews and literature study. The results of this research are 1) The government makes wage policies to protect workers. One of them is the minimum wage for Pekanbaru Province/city by following applicable laws and regulations. 2) The form of legal relationship between the rights and obligations of notary employees in the work relationship that exists between workers and notaries in the city of Pekanbaru still exists only in the form of an oral work agreement and is not preceded by a written work agreement. 3) Efforts to protect wages are in the Employment Law which is strictly Frankly, it is determined according to the minimum wage for the welfare of workers, but notaries have not unanimously determined the wage according to the minimum wage. In the city of Pekanbaru, there are still those who set it below the minimum wage. The conclusions of this research are 1) the minimum wage regulations implemented by the government should be given more attention by employers or notaries who should still comply with the Employment Law and the applicable Decree of the Governor of Riau by providing decent wages. 2) The legal relationship between the notary and the notary's employees is further clarified with more accurate rules of rights through a written work agreement that guarantees legal certainty therein. 3) efforts in at least good faith to rethink wages and the welfare of notary employees so that excellent working relationships can be established.

Keywords: Legal Protection, Notary Employees, Minimum wage